

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA ROMANGLASA KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**



Nomor Induk Mahasiswa : 1056 1110 2317

Oleh:
RISKAYANTI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
04/09/2021
1 exp.
Sub. Alumni
R/0118/ADM/21 CD
RIS
P'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA ROMANGLASA KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

RISKAYANTI

Nomor Stambuk: 10561 11023 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Riskayanti
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11023 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dekan

Ketua Program Studi

Ihyani Malik
Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq
Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si

)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

()

3. Dr. Abdi, M.Pd

()

4. Nurbiah Tahir S.Sos., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RISKAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611102317

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Riskayanti

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonomo Kabupaten Gowa*”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi negara pada fakultas ilmu sosial dan politik universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I dan kepada bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga, motivasi, arahan, saran-saran yang sangat berhargayang diberikan pembimbing pada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis
5. Teristimewa untuk kedua orang tua saya ayahanda Sangkala dan Ibunda Kamariah, karena berkat do'a ,kasih sayang yang begitu tulus dan dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas dan lahir batin mendidik,merawat, membina, membesarkan dan mendampingi sehingga

penulis sampai pada penyelesaian skripsi ini.

6. Dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
7. Pihak aparat dan masyarakat desa yang telah membantu memberikan informasi dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi.
8. Adek saya serta kakak dan keluarga yang selalu memberikan suport dan semangat menyelesaikan skripsi
9. Dan orang terdekat yang bersedia meluangkan waktu kapan pun untuk mengantar saya bimbingan skripsi
10. Teman-teman kelas terkhusus ibu ika pransiska putri yang bersedia memberi tempat singgah dikos pada saat proses bimbingan skripsi
11. Saudari indra satriani yang siap mendengar keluh kesah terkait skripsi dan siap menampung saya di kosnya selama tahap perampungan skripsi
12. Teman seperjuangan Rahmawati yang bersedia menemani, membantu dan mensupport sampai di tahap penyelesaian skripsi
13. Teman-teman mahasiswa seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kelas A angkatan 2017 aatas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, September 2021



Riskayanti

ABSTRAK

RISKAYANTI 2021, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Di bimbing oleh Budi setiawati dan Ansyari Mone).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar benar terjadi di lapangan selama penelitian. Dalam penelitian ini terdapat informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari kepala desa Romanglasa, sekretaris desa Romanglasa, 2 anggota BPD, 1 anggota kepala Dusun, 1 anggota RT, 1 anggota RW, 1 anggota LSM dan 3 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam bentuk: 1). partisipasi pikiran yaitu: a). Bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dan b). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), 2). partisipasi tenaga dalam bentuk kerja bakti dan gotong royong 3). partisipasi keahlian berupa keterampilan, 4). partisipasi barang berupa alat dan perkakas dan 5). partisipasi uang berupa iuran dana yang dilakukan oleh masyarakat di desa Romanglasa masih sangat minim dan masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat	8
C. Teori Pembangunan Infrastruktur	15
D. Konsep Pembangunan Infrastruktur	17
E. Kerangka Pikir	19
F. Fokus Penelitian	19
G. Definisi Fokus	20

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	21
C. Informan.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Pengabsahan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi lokasi penelitian.....	26
1. Profil Desa Romanglasa.....	26
2. Jumlah penduduk.....	27
3. Visi dan Misi Desa Romanglasa.....	28
4. Tingkat pendidikan dan mata pencaharian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	36
a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.....	36
1. Pembangunan infrastruktur anggaran Tahun 2018-2021.....	36
b. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	
1. Partisipasi Pikiran (<i>psychological Participation</i>).....	44
a. Partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG.....	45
b. Partisipasi masyarakat dalam RPJMDes.....	48
2. Partisipasi Tenaga (<i>Physical Participation</i>).....	52
3. Partisipasi Keahlian (<i>participation with skill</i>).....	56

4. Partisipasi Barang (<i>Material Participation</i>)	58
5. Partisipasi Uang (<i>Money participation</i>).....	61
C. Hasil Pembahasan	66
1. Partisipasi Pikiran (<i>psychological Participation</i>)	67
2. Partisipasi Tenaga (<i>Physical Participation</i>).....	68
3. Partisipasi Keahlian (<i>participation with skill</i>).....	69
4. Partisipasi Barang (<i>Material Participation</i>).....	70
5. Partisipasi Uang (<i>Money participation</i>).....	70
BAB V KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Penelitian	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	27
Tabel 4.2 Struktur organisasi pemerintahan desa Romanglasa	29
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.4 Jenis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa Romanglasa Tahun 2018-2021	37
Tabel 4.5 Data Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2018-2020	40
Tabel 4.6 Data Pengelompokan Masalah Pembangunan Infrastruktur	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah di peroleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan untuk mendukung suatu program dengan cara yang beragam. Melalui pendekatan partisipatif peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam keikutsertaan secara fisik, tetapi ketelibatannya dalam menyumbangkan pemikiran serta pemecahan masalah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun kenyataan yang ada pembangunan infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan Undang-Undang yang di terapkan. Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Proses demokratisasi di Indonesia diharapkan mampu mengikutsertakan dan memaksimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terlebih yang langsung berkenaan dengan mereka, seperti program-program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, seperti yang dikutip oleh Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif meliputi partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, partisipasi uang.

Ditinjau dari akhir tahun 2019-2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul sebuah wabah covid-19 yang awal mulanya muncul secara lokal di Wuhan-China pada akhir 2019, lalu merembak keseluruh bagian negara-negara di dunia yang memporak porandakan sendi perekonomian di dunia terkhusus di negara Indonesia ini. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan terkhusus di desa Romanglasa, Virus covid-19 telah membuat aspek-aspek kehidupan melemah terkhusus aspek pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang mengakibatkan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 itu sendiri.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan

yang diharapkan. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang berada dilingkungan sekitar. karena pemerintah sampai saat ini tidak melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan infrastruktur.

Seperti halnya yang terjadi di desa Romanglasa di mana program pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif tidak berjalan sesuai dengan keadaan dilapangan. Kebijakan pemerintah desa yang hanya mewakili kepada pihak yang terkait pada saat proses perencanaan atau pengambilan keputusan terkesan hanya menggugurkan kewajiban, masyarakat yang diharapkan mampu memberikan aspirasi seringkali terjebak dalam proses perencanaan program pembangunan infrastruktur dimana masyarakat hanya merencanakan keinginan bukan skala kebutuhan yang ada dalam lingkungan sekitar desa Romanglasa.

Strategi pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat kurang terjalin sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyalurkan aspirasi secara langsung yang mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam kegiatan pembangunan yang di lakukan sehingga masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan masing-masing.

Undang– Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Tujuan pembangunan pedesaan serta Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan : 1).

Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. 2). Perencanaan pembangunan desa diseenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 3). Dalam menyusun rencana pembangunan desa (RPJM desa dan RKP-Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. 4). Pembangunan desa dillaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. 5). Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 6). Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian pembangunan kawasan pedesaan partisipatif perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Di era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peran masyarakat cukup strategis dalam mendorong dan menghidupkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui upaya kerjasama lintas sektor dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencegah serta menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan bencana ekonomi, sosial dan ekologi pada masa depan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dengan penelitian ini penulis sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
2. Secara praktis adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait secara langsung guna penetapan konsep selanjutnya, khususnya dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi diperguruan tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikutip dari beberapa jurnal dan skripsi:

- a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa), Nurwanda (2016). Dalam penelitian ada beberapa indikator yang digunakan sebagai bahan fokus penelitian dalam menerapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik yaitu: a). Partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran. b). Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. c). Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian. d). partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. e). Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau dana.
- b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng Rappang, Latif et al., (2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng dalam pelaksanaan pembangunan fisik sudah sangat baik dengan indikator persentase yang telah disebutkan.
- c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Hayati (2017). Dalam penelitian menjelaskan tentang antusias dari masyarakat

setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti gotong royong dalam pembangunan jalan tani.

Adapun perbedaan yang dapat di uraikan dengan bentuk tabel di atas adalah:

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Penelitian

No	Judul peneliti dan nama peneliti	Metodologi	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa) Nurwanda, (2016)	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sudah dilaksanakan secara keseluruhan.	Lokasi penelitian serta analisis data.
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng Rappang, Latif et al., (2019).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi penelitian kuantitatif.	Tingkat partisipasi masyarakat di desa tersebut dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik.	Lokasi penelitian an metode penelitian yang digunakan.
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Hayati (2017).	Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yang menjelaskan tujuan dan kejadian yang ada di desa tersebut.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan infrastruktur di desa tersebut sudah cukup .baik dengan kontribusi dari masrakat setempat.	Lokus penelitian

B. Pengertian partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri, Haliim (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab dan transparan, Rahman (2016).

Menurut Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Menurut Santoso Sastropetra (1998) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran di sertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, Maripah (2017).

Menurut Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati (2019), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sastropetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan

ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata,Minahasa (2007).

Menurut Conyer Diana (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting,yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Masyarakat akan mengetahui seluk beluk dari program pembangunan dan akan merasa memiliki terhadap pembangunan tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa masyarakat memiliki suatu hak demokrasi bilamana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan aspirasi untuk menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan.

Dari segala pendapat yang ada mengenai partisipasi masyarakat dapat ditarik benang merah bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk memberikan pendapat dan tenaga baik secara berkelompok ataupun perindividu dalam suatu kegiatan baik formal maupun nonformal serta harus di dukung dengan kesadaran dari dalam dirinya ataupun dorongan dari orang lain untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi.

a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Menurut Davis (sastropetro, 1986:16) mengemukakan bentuk-bentuk

partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*psychological participation*)

Pikiran atau gagasan yang bersumber dari masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk masukan atau usulan yang berharga bagi terwujudnya suatu proses pembangunan infrastruktur baik berupa pembangunan jalan, beton, pengaspalan dan lainnya. Partisipasi pikiran tidak sebatas memberi gagasan terhadap pembangunan fisik melainkan sebuah saran atau usulan yang berharga ke pemerintah desa untuk terwujudnya suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tenaga (*physical participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menyumbangkan atau memberikan kontribusi tenaga sebagai bentuk sumbangan swadaya dari masyarakat. Komitmen ini sebagai kesepakatan dari pemerintah desa dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok.

3. Keahlian (*participation with skill*)

Partisipasi keahlian sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk memberikan keterampilan di bidangnya. Partisipasi keahlian merupakan keterampilan yang dilakukan melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

4. Barang (*material participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan atau memberikan alat dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna untuk memperlancar proses pengerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri.

5. Dana (*money participation*)

Peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa uang sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk materi. Walaupun prosesnya bisa secara tidak langsung, namun implikasinya dapat mewujudkan suatu hasil berupa yang dapat menunjang pembangunan infrastruktur.

b. Tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Tjokmidrojo (1998:104) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Partisipasi dalam keterlibatan dalam proses penentuan arah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

c. Macam-macam partisipasi masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (Irene, 2015:61) partisipasi dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa di capai.
4. Partisipasi dalam evaluasi. partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh untuk mengetahui apakah pelaksanaan program yang telah direncanakan berjalan sebagaimana dengan struktur yang telah direncanakan.

d. Manfaat dan fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Carter (Suntoso, 2005:2), menyebutkan bahwa fungsi dari masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- c. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- d. Partisipasi masyarakat sebagai terapi

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- b. Meningkatkan proses belajar
- c. Meminimalisir perassan terasing
- d. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

e. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Menurut Santoso Sastropetro (1998) faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a. Faktor kesadaran atau kemauan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk ikut berpartisipasi, salah satu diantaranya yaitu faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
- b. Adanya partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang di dorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat. Apalagi yang memulai adalah pemimpin. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
- c. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan saha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai

kontrol sosial ditengah masyarakat.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menurut Santoso Sastropetro (1998) yaitu:

a. Rendahnya kualitas pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD,SMP, dan SMA. Hal ini di sebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Dari hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka.

Meraka hanya memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Ini menjadikan kendala dalam penetapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Pleh karena itu masyarakat harus dingatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan.

b. Tingkat pendapatan rendah

Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan, ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena terfokus pada pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan.

c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta

mengkatungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih di dominasi oleh sektor pertanian.

C. Teori pembangunan infrastruktur pedesaan

a. Pengertian pembangunan infrastruktur

Pembangunan adalah perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak kepada pembangunan masyarakat yang diharapkan mampu memacu partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri, Orocomna (2004). Menurut Siagian (1994:9), pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Adisasmita (Rahman, 2016), pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dari masyarakat pada keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Menurut Todaro (Maripah, 2017), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Menurut Ginandjar

Kartasmita (Hayati, 2017), menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu diantaranya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.

Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Nain (2019). Pembangunan dapatlah dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, Pangemanan (2017).

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada, Suwandi & Rostyaningsih (2012).

Dengan demikian pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebuah program terencana yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi keterbelakangan kemiskinan yang dengan demikian pembangunan ini dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

b. Prinsip-prinsip pembangunan

Menurut Solaeman (Zamhariri, 2008), pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Transpransi (keterbukaan)
2. Partisipasi

3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

D. Konsep pembangunan infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menjadikan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi. Pada dasarnya pelaksanaan infrastruktur dilaksanakan oleh masing-masing individu, sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, Kogoya et al., (2015).

Berbagai program pengembangan pembangunan telah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang meliputi pembangunan infrastruktur pedesaan, perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menurut Hadi (2015), konsep dari pembangunan yang partisipatif ini meliputi tiga unsur, yaitu:

1. Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan serta evaluasi pembangunan.
2. Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang sebagai proses dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat

keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain:

1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri. (Kogoya et al., 2015).

E. Kerangka pikir

Menurut Uma (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan demikian kerangka maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang paling melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman mendasar dan pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian yang akan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan pada umumnya.

Sehubungan dengan teori dan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Davis (Sastropetro, 1986:16) berupa bentuk-bentuk partisipasi dalam Pikiran

(*psychological participation*), Tenaga (*physical participation*), Keahlian (*participation with skill*), Barang (*material participation*) dan Dana (*money participation*)



Gambar 2.1 kerangka pikir

F. Fokus penelitian

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka fokus penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam bentuk partisipasi pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang dengan tujuan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama melalui pelaksanaan kebijakan dari program pembangunan.

G. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Pikiran (*psychological participation*) adalah keikutsertaan masyarakat untuk memberikan sebuah gagasan atau ide sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik.
2. Partisipasi Tenaga (*Physical participation*) adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan energi secara individu atau kelompok pada saat proses pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.
3. Partisipasi Keahlian (*participation with skill*) adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangsih berupa keterampilan yang dimiliki berdasarkan kemampuan atau keahliannya pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berlangsung.
4. Partisipasi Barang (*Material participation*) adalah partisipasi masyarakat berupa barang atau alat yang bisa digunakan dalam menunjang proses pembangunan infrastruktur.
5. Partisipasi Dana (*Money participation*) adalah keikutsertaani masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa uang, iuran, dana atau proses pengajuan-pengajuan yang terprosedur untuk mendapatkan dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian berlangsung 2 (dua) bulan dan tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat di lingkungan Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan peristiwa yang benar-benar terjadi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa romanglasa kecamatan bontonompo kabupaten gowa. Oleh sebab itu melalui pendekatan kualitatif ini yaitu dengan menggabungkan dan mencocokkan antara peristiwa yang terjadi dengan teori yang berlaku.
2. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek penelitian selama penelitian berlangsung.

C. Informan penelitian

Dalam penelitian, peran informan sangat penting dan perlu. Penentuan narasumber dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan

dengan cara, memilih orang tertentu yang di pandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Peneliti ini terdapat informan yaitu:

tabel 3.1 data Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Abdul Haris	AH	Kepala Desa	1
2.	Enny Hasriani	EH	Sekretaris	1
3.	Nurdin Nompo	ND	Ketua BPD	1
4.	Said	SD	Anggota BPD	1
5.	Makmur	MR	Kepala Dusun	1
6.	Bagan	BG	Ketua RW	1
7.	Miala	ML	Ketua RT	1
8.	Muhammad ichsan	MI	Ketua LSM	1
9.	Agus salim	AS	Masyarakat	1
10.	Ramli	RM	Masyarakat	1
11	Nyembang	NY	Masyarakat	1
Jumlah				11

D. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi lapangan

Observasi lapangan merupakan pengawasan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala gejala dalam objek penelitian, observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana partisipasi

masyarakat dalam pembangunan di desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasil observasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh makna yang rasional dengan melakukan percakapan secara berhadapan langsung (*face to face*) dengan informan . kegiatan ini dilakukan secara santai namun sistematis, dimana informan dapat mengeluarkan ide, pandangan dan perasaan secara natural.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian, dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait.

E. Teknik pengabsahan data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut sugiyono (2017:125) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut sugiyono (2017:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan,wawancara dan dokumen dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang mana dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda beda,maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

F. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat di olah secara

sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subyek peneliti maupun informasi peneliti untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan merekan semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah di reduksi dapat memberikan suatu gambaran lebih jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa romanglasa kecamatan bontonompo kabupaten gowa.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan hubungan, antar kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan lebih muda menjelaskan mengenai hasil yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*)

Langkah ketiga dari analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Profil Desa Romanglasa

Desa Romanglasa merupakan bagian dari daerah Kabupaten Gowa yang senantiasa mengambil bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bontonompo baik sebagai subjek maupun objek pada tingkat desa yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang terus berkelanjutan demi masa depan Kabupaten Gowa pada umumnya.

Desa Romanglasa terletak antar $119^{\circ} 24' 23''$ BT, $5^{\circ} 18' 19''$ LS dan $119^{\circ} 24' 12''$ LS, $5^{\circ} 18' 25''$ BT dengan luas wilayah $2,00 \text{ km}^2$ yang terbagi atas 3 dusun yakni Dusun Tanete, Dusun Bontosallang dan Dusun Borongrappoa. Batas-batas wilayah Desa Romanglasa yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo.

2. Jumlah penduduk di Desa Romanglasa

Penduduk dari Desa Romanglasa pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berjumlah 2.621 jiwa sedangkan tahun 2020 tercatat 2.644 jiwa. Jumlah penduduk terbesar yakni 1.241 jiwa yang mendiami Dusun Bontosallang pada tahun 2020 dan jumlah penduduk yang paling rendah berada pada Dusun Tanete yakni 510 jiwa per tahun 2020.

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di Desa Romanglasa lebih sedikit di banding dengan jumlah penduduk perempuan untuk pertahunnya. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki penduduk Desa Romanglasa sebanyak 1.270 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 1.374 jiwa. Jumlah penduduk Desa Romanglasa dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 jumlah penduduk menurut jenis kelamin tiap dusun di Desa Romanglasa, 2019 sampai 2020

Dusun	Jenis kelamin		Jumlah	
	Laki-laki	perempuan		
1. Tanete	248	262	510	
2. Bontosallang	581	660	1.241	
3. Borongrappoa	441	452	893	
Jumlah				
	2020	1.270	1.374	2.644
	2019	1.257	1.364	2.621

Sumber: Badan Statistik Kecamatan Bontonompo

3. Visi dan misi Desa Romanglasa

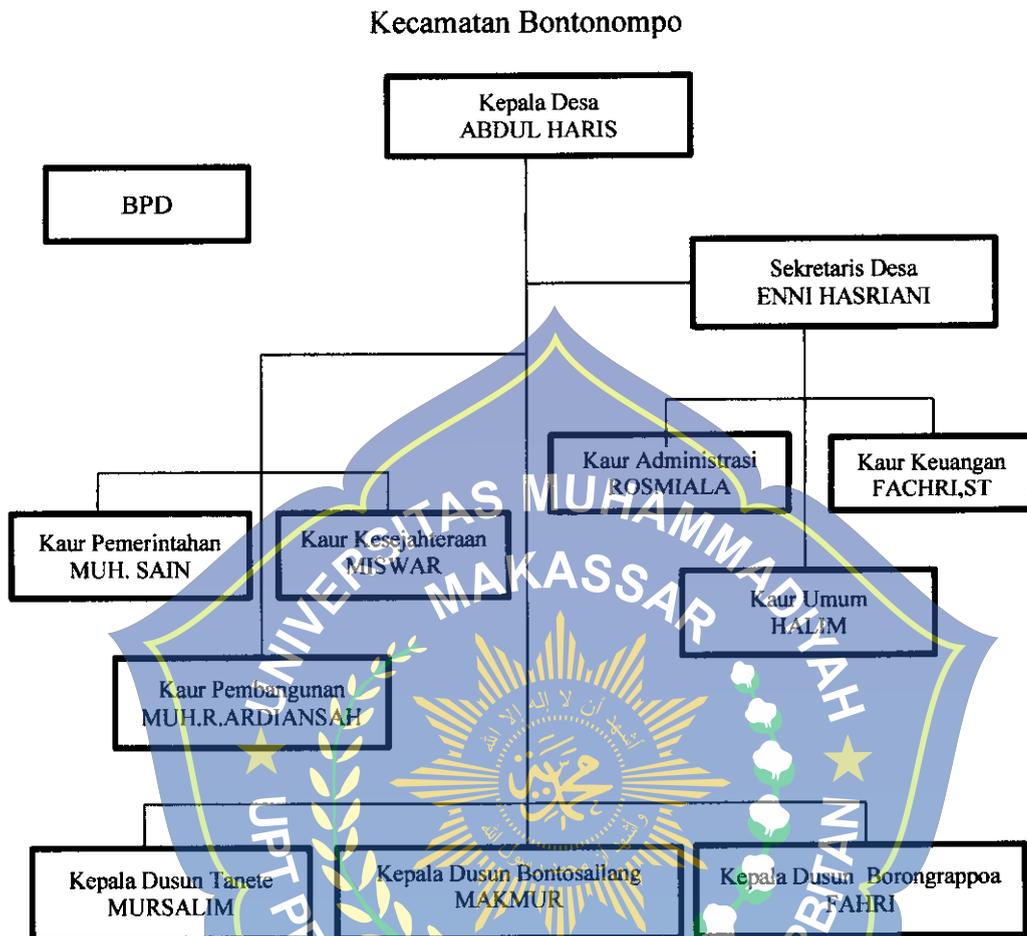
a. Visi

“Terwujudnya Desa Romanglasa yang aman, sehat dan sejahtera dengan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya”.

b. Misi

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat
2. Meningkatkan kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan dan peningkatan hasil pertanian.
3. Memperkuat peran pemerintah desa, lembaga dan organisasi yang ada di desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif di wilayah Desa Romanglasa.
6. Senantiasa melakukan kerjasama dan koordinasi aktif antar aparat dalam merumuskan pembangunan yang berkesinambungan.
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan budaya.

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Romanglasa



Struktur organisasi pemerintahan desa Romanglasa:

1. Kepala Desa
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Sektertaris Desa
4. Pelaksana teknis desa terdiri dari:
 - a. Kepala urusan keuangan
 - b. Kepala urusan administrasi
 - c. Kepala urusan umum
 - d. Kepala urusan pemerintahan

- e. Kepala urusan pembangunan
 - f. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
5. Kepala kewilayahan
- a. Kepala Dusun
 - b. Kepala RT/RW
1. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat. Kewajiban dari seorang kepala desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 yaitu memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.
- Pemerintah desa melaksanakan fungsinya:
- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - e. Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokrasi.

BPD menyelenggarakan fungsinya:

- a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Sekretaris desa menyelenggarakan fungsinya:

- a. Menyelenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
 - b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
 - c. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
 - d. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa
 - e. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada seorang kepala desa
4. Pelaksana teknis
 - a. Kepala urusan keuangan untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APBD serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

Kepala urusan keuangan menyelenggarakan fungsinya:

 1. Mengelola administrasi keuangan desa
 2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes

3. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
 4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris desa
- b. Kepala urusan administrasi membantu sekretaris desa dalam melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan seperti tata naskah,administrasi surat menyurat,arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa.

Kepala urusan administrasi menyelenggarakan fungsinya:

1. Melakukan administrasi surat meyurat serta pelayanan umum
 2. Melaksanakan tugas administrasi kearsipan,dokumentasi data dan kepustakaan.
 3. Mencari,mengumpulkan,menghimpung dan mengelola serta menyajikan data-data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya
 4. Melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas
- c. Kepala urusan umum untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum,tata usaha kearsipan ,pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat laporan.

Kepala urusan umum menyelenggarakan fungsinya:

1. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan untuk desa
2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
3. Pengelolaan administrasi perangkat desa
4. Sebagai penyedia,penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta

pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang ada di kantor.

- d. kepala urusan pemerintahan untuk membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Kepala urusan pemerintahan menyelenggarakan fungsinya:

1. melaksanakan administrasi kependudukan
 2. administrasi pertanahan
 3. melaksanakan pencatatan monografi desa
 4. mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil di pedesaan.
- e. Kepala urusan pembangunan membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat di desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan untuk masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.

Kepala urusan pembangunan menyelenggarakan fungsinya:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
2. Menyiapkan bantuan-bantuan untuk analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat

3. Mengelola tugas pembantuan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seorang kepala desa
- f. Kepala urusan kesejahteraan rakyat untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsinya:

1. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
 2. Melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
 3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program-program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
5. Kepala wilayahan
- a. Kepala Dusun membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kepala Dusun menyelenggarakan fungsinya:

1. Membantu kepala desa melakukan kegiatan dalam pembinaan dan kerukunan warga desa
2. Pelaksana dari tugas seorang kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditetapkan
3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4. Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa
 - b. Kepala RT/RW membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kegiatan kerukunan warga.
 - c. Warga desa/masyarakat desa

4. Tingkat pendidikan dan mata pencaharian di desa Romanglasa

Tingkat pendidikan penduduk di desa Romanglasa masih rendah dimana masyarakat kebanyakan hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya sebagai generasi penerus bangsa. Ini menyebabkan mereka hanya bergelut di lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan dan rendahnya pendapatan.

Masyarakat hanya memikirkan bagaimana cara mempertahankan hidup tanpa memikirkan generasi nasib penerus bangsa dimasa yang akan datang, minimnya pendidikan masyarakat menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% bermata pencaharian sebagai petani dan pembuat batu bata. Selain itu masalah rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi kendala dalam penerapan inovasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan di desa Romanglasa

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	365
2.	SD	387
3	SMP	313
4.	SMA	401
5.	Perguruan Tinggi	71

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di desa Romanglasa masih sangat rendah dimana masih banyak masyarakat yang bahkan tidak tamat sekolah dasar sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan infrastruktur mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan dan lebih menyerahkan kepada pemerintah sepenuhnya. Karena masyarakat akan lebih terfokus kepada pekerjaan masing-masing.

B. Hasil Pembahasan

a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

1. Pembangunan infrastruktur Tahun 2018-2021

Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari proses perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis masalah dan perumusan masalah yang tepat. Dalam perumusan masalah ini perencanaan harus berasal dari bagaimana kita memiliki keinginan untuk keluar

dari permasalahan yang ada dan mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang kita inginkan dan dapat di capai secara rasional.

Perencanaan bersama masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang paling mendasar untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Sebagaimana di kutip dari teori Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati,2019) bahwa masyarakat harus ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi mengenai masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan keadaan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam proses pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Masyarakat harus mampu memberikan aspirasi mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok yang di dukung dengan kesadaran diri sendiri maupun dorongan orang lain. Adapun Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Romanglasa pada tahun 2018-2021 yaitu:

Tabel 4.4 jenis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa

No	Jenis pembangunan infrastruktur
1	Jalan paving blok
2	Drainase
3	Talud

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa pembangunan infrastruktur didesa Romanglasa pada tahun 2018 sampai 2021 yaitu pembuatan jalan paving block berupa jalan tani dan jalan desa yang bertujuan untuk mempermudah akses jalan warga,memperlancar aktivitas warga dan antar desa,sebab akses jalan menjadi faktor penting dalam distribusi hasil pertanian dan produksi batu bata mengingat mayoritas warga di desa Romanglasa adalah petani dan pembuat batu bata. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah dari suau tempat yang di gunakan untuk mengalirkan resapan air hujan di lingkungan warga menuju ke badan sungai yang terdekat. Talud adalah bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah yang ketebalan minimum 25 cm dengan kedalaman pondasi sesuai dengan hasil penyelidikan tanah, mengingat fungsi dari jalan desa dan jalan pertanian maka pembangunan Talud jalan desa dan pertanian di harapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi dan perhubungan darat antar desa dan mempermudah aktivitas para petani. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2020. Namun pada akhir tahun 2019 ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda karena adanya wabah virus covid 19 kemudian dikerjakan kembali setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk di laksanakan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa selama tahun 2018 sampai saat ini yaitu kebanyakan perbaikan jalan dan pembuatan jalan paving blok, Drainase dan Talud. Namun karena adanya wabah covid 19 pada akhir 2019 pembangunan infrastruktur sempat terhenti dan dilanjutkan kembali setelah adanya arahan atau kebijakan dari pemerintah untuk melanjutkan kembali”. (Hasil wawancara dengan AH, 31 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa berupa perbaikan jalan, pembuatan jalan paving blok, Drainase dan Talud. Namun pembangunan infrastruktur ini sempat terkendala karena adanya dampak virus covid 19, kemudian dilanjutkan kembali setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kembali.

Senada dengan wawancara dengan salah satu anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Romanglasa ada beberapa yang sudah direncanakan namun yang berhasil terealisasi dengan baik yaitu seperti pembuatan jalan paving di beberapa lorong masuk ke pemukiman warga serta perbaikan jalan, pembuatan Drainase di setiap Dusun dan pembuatan Talud. Tapi ada juga beberapa pembangunan infrastruktur lainnya yang belum sempat dilaksanakan karena terkendala oleh wabah virus covid 19 serta anggarannya”. (Hasil wawancara dengan SD 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Romanglasa, namun yang terealisasi dengan baik yaitu pembuatan jalan paving, Drainase dan Talud. Namun rencana yang telah dibuat sebelumnya terkendala oleh wabah virus corona yang berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan adanya refocusing anggaran yang ditetapkan. Hal ini membuat pelaksanaan pembangunan infrastruktur tertunda akibat dampak dari virus 19 tersebut.

Seperti yang di katakan oleh salah satu masyarakat di desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“yang saya lihat dan rasakan pembangunan fisik di desa Romanglasa itu kebanyakan perbaikan jalan yang rusak sebelumnya, lalu ada Drainase dan ada pembangunan Talud juga”. (Hasil wawancara dengan NY 5 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa adalah perbaikan jalan sebelumnya serta pembuatan jalan paving untuk menjangkau atau mempermudah warga yang tinggal di lingkungan yang padat akan rumah penduduk sekitar dan pembuatan Drainase yang ada di setiap dusun serta pembuatan Talud.

Pembangunan infrastruktur dikelola berdasarkan perolehan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa merupakan dana hasil implementasi dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan pengelolaannya oleh negara kepada desa untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan daerah. Berikut penggunaan rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur 2018 sampai 2020.

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2018-2020

Tahun	Kegiatan	Lokasi	Total anggaran	Sumber
	Pembuatan batas RT	Dusun Borongrappoa	35.197.000	Dana Desa

2018	Lanjutan pekerjaan saluran Drainase	Dusun Tnete	104,162,100	
	Pembuatan Talud depan kantor desa	Dusun Borongrappoa	57.850.700	
	Pengerjaan plat Duicker (1x3 m)	Dusun Bontosallang	7.489.000	
	Pengerjaan plat Duicker (1x5 m)	Dusun Borongrappoa	13.482.00	
	Pengerjaan Paving blok (180 m)	Dusun Tanete	18.,986.000	
	Pengerjaan paving blok (135 m)	Dusun Bontosallang	137.876.000	
	Pengerjaan paving blok (180 m)	Dusun Borongrappoa	166.281.00	
2019	Pekerjaan Drainase (67 m)	Dusun Borongrappoa	69.989.000	APBD
	Pekerjaan plat Duicker	Dusun Bontosallang	5.493.000	
	Pekerjaan plat Duicker	Dusun Bontosallang	5.231.000	
	Pembangunan balai pertemuan masyarakat desa	Dusun Borongrappoa	617.800.000	
	Pembangunan paving blok (145 m)	Dusun Borongrappoa	173.499.300	
	Pembangunan paving blok (146 m)	Dusun Bontosallang	170.384.000	
2020	Sirtu Dusun Bontosallang (229x5 m)	Dusun Bontosallang	76.464.000	ADDS
	Plat Duicker (1x5 m)	Dusun Bontosallang	14.148.000	
	Rumah data kantor desa	Kantor desa	35.892.000	
	Pengerjaan paving blok (22 m)	Dusun Borongrappoa	17.646.000	
	Pengerjaan paving	Dusun Tanete	97.089.000	

	blok (95x1,3 m)			
--	-----------------	--	--	--

Dari data di atas menunjukkan bahwa rencana anggaran dana desa bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Alokasi Dana Desa Swadaya (ADDS). Semua sumber pendapatan yang diterima oleh desa harus digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, salah satunya pembangunan infrastruktur. Proses pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan partisipatif sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa akan ditentukan oleh desa sejauh mana peran serta masyarakat desa dalam memberikan aspirasi untuk melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pembangunan tersebut.

Selain pembangunan desa akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yaitu: transparansi, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan desa.

Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“ Dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dengan proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap-tahap berdasarkan proses pencairan anggaran dan ini melalui proses musyawarah

pembangunan, tapi untuk tahun ini karena terdampak pandemi covid-19 adanya pemotongan anggaran atau refocusing tergantung dari tingkat urgensi atau kebutuhannya maka anggaran tersebut disesuaikan dengan skala prioritas tingkat kebutuhan yang mendesak dan ini disetujui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.” (Hasil wawancara dengan EH, 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable), proses pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan pencairan dari anggaran yang ada untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Namun karena adanya wabah pandemi covid 19 ini adanya pemotongan atau refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.

Senada dengan pendapat dari kepala desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Di lihat dari keadaan perekonomian sekarang akibat adanya wabah virus corona atau covid 19 ada pemotongan atau refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 berupa bantuan kepada masyarakat seperti BLT, BST dan lain sebagainya dan ini sudah direncanakan sebelumnya dan ini salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dibidang perekonomian karena semua orang terdampak.” (Hasil wawancara dengan AH, 31 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemotongan anggaran ini dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini pembuatan kebijakan akan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sempat tertunda dengan perencanaan sebelumnya akibat adanya

refocusing anggaran.

Dari beberapa wawancara di atas mengenai pembangunan infrastruktur dan anggaran yang di gunakan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis pembangunan yang ada di desa Romanglasa baik sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat desa setempat untuk kesejahteraannya yang dikelola dengan menggunakan beberapa jenis sumber anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari anggaran dana desa itu sendiri guna menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur itu sendiri.

b. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*)

Partisipasi pikiran merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut terlibat dalam menganalisis permasalahan, lalu merumuskan masalah yang terjadi dalam lingkungan desa.

Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan adanya musrenbang ini maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau

pelaku dalam merencanakan pembangunan di desa Romanglasa yang di wakili oleh beberapa perwakilan dari para pemangku kepentingan stakholder baik itu dari kepala Dusun dan RT, Tokoh Masyarakat, Ketua Remaja dan LSM. Melalui perwakilan ini mereka diharapkan membawa inspirasi,pikiran, dan masukan berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap dusun,kelompok,lembaga dan lainnya. Dalam proses perumusan masalah ini ada beberapa tahap dalam pelaksanaannya, yaitu:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Adapun partisipasi pikiran yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di desa Romanglasa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi untuk memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Kemudian permasalahan yang telah didiskusikan secara musyawarah mufakat akan di usulkan kepada pemerintah melalui badan pengawas desa (BPD) berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.

Fokus utama dari pembahasan Musrembang adalah fokus pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa harus mampu bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan serta kemajuan desa, dengan cara memotret potensi desa dan sumber-sumber

pembangunan yang tidak tersedia baik di dalam desa maupun di luar desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi media pemerintah untuk melibatkan semua kalangan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak adanya, di samping untuk merangkul tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan di jalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu masyarakat desa setempat yang mengatakan bahwa:

“Kadang saya tidak sempat ikut berpartisipasi karena adanya beberapa kendala pekerjaan yang mengakibatkan saya tidak bisa ikut pada proses pengambilan keputusan pada saat proses perumusan masalah yang terjadi di lingkungan setempat.” (Hasil wawancara dengan RM, 6 Juni 2021).

Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa masyarakat terkadang tidak bisa ikut berpartisipasi pada saat perumusan masalah yang terjadi di lingkungan setempat karena adanya beberapa kendala masalah pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi pada proses tersebut.

Berikut wawancara ketua RT Dusun Bontosallang Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Memang betul pada saat proses pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar hanya di wakili oleh beberapa pihak terkait ataupun mewakili, kemudian masalah yang telah di usulkan dan telah mencapai hasil musyawarah mufakat ini di bawah ke proses musrenbang untuk di bicarakan kembali berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya”. (Hasil wawancara dengan BG, 31 Mei 2021).

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah lingkungan sekitar hanya di wakili oleh beberapa orang seperti ketua RT,RW dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam perumusan masalah tersebut berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. Kemudian dari beberapa masalah yang terjadi akan di pertimbangkan kembali pada saat pengambilan keputusan di proses musrenbang.

Tambahan wawancara dengan ketua BPD (Badan Pengawas Desa) yang mengatakan bahwa:

“Pada saat proses pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi di beberapa dusunnya, hanya di wakili oleh beberapa orang seperti kepala Dusun,RT/RW ataupun tokoh masyarakat yang sempat hadir untuk proses pengambilan keputusan tersebut, kemudian permasalahan yang telah dibicarakan bersama di pertimbangkan kembali untuk dalam musrenbang agar masalah tersebut bisa segera di selesaikan”. (Hasil wawancara dengan ND, 3 Juni 2021).

Wawancara di atas di ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi harus di pertimbangkan kembali berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar masalah yang terjadi bisa di tangani dengan bijak oleh pemerintah.

Proses pembuatan keputusan atau perumusan masalah mengenai pembangunan dimana msasyarakat memberikan pemikiran berupa saran, kritik maupun masukan yang dapat ditampung dan terima sebagai suatu aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang mewakili memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan infrastruktur

yang lebih baik.

b. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam proses perencanaan pembangunan yang baik pemerintah desa di tuntut untuk akuntabel dan partisipatif dalam proses perencanaannya sesuai dengan amanah undang-undang desa. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan suatu kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan dalam jangka 5 tahun. Proses RPJMDes di desa Romanglasa dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi covid 19. Berikut daftar masalah yang di bahas dalam pelaksanaan RPJMDes yaitu:

Tabel 4.5 Daftar pengelompokan masalah

No	Masalah
1.	Terdapat jalan utama sepanjang 800 meter di Dusun Bontosallang, lanjutan jalan yang telah dipaving blok masih rusak.
2.	Terdapat dua lorong mengelilingi Dusun Tanate sepanjang 500 meter yang becek di musim hujan berdebu di musim kemarau.
3.	Terdapat jalan tani sepanjang 500 meter di Dusun Borongrappoa yang becek dan berlubang.
4.	Terdapat suatu perkampungan di Dusun Bontosallang yang tidak memiliki jalan tani maupun jalan desa sepanjang 1500 meter.

5.	Terdapat jalan di RK 01 RT 01 Dusun Bontosallang sepanjang 250 meter yang menghubungkan desa Gentungan Kec.Bajeng Barat rusak.
6.	Terdapat jalan sepanjang 200 meter di Dusun Bontosallang yang sering menjadi jalur distribusi angkutan batu merah yang terhubung dengan desa Gentungan, namun sempit dan becek karena sering di cangkul petani.
7.	Perlu pembuatan jalan dusun di perkampungan Bontosallang sepanjang 450 meter karena banyaknya pemukiman warga yang terdapat ditengah-tengah perkampungan Dusun Bontosallang.
8.	Perlu pengerjaan Drainase yang ada keliling desa Romanglasa sepanjang 3 km.
9.	Terdapat jalan tani dan perlu juga di Talud di Dusun Tanete tembus di Bontobiraeng Selatan sepanjang 700 meter.
10.	Saluran irigasi sepanjang 1 km di Dusun Bontosallang yang perlu dikerjakan.
11.	Saluran irigasi sepanjang 1 km di desa Romanglasa yang perlu dikerjakan.

Dari tabel pengelompokan masalah di atas dapat diketahui bahwa di desa Romanglasa banyak masalah yang harus segera di tangani untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Perencanaan yang baik menghasilkan pembangunan yang baik pula.

Berikut ini hasil wawancara dengan kepala Desa Romaglasa yang mengatakan bahwa:

“ Pada proses perencanaan RPJMDes tidak semua lapisan masyarakat ikut dilibatkan hanya ada beberapa orang yang terkait atau di wakikan kepada pihak terkait seperti stekholder, BPD,kepala Dusun,RT/RW dan para tokoh masyarakat apalagi ini masa pandemi covid 19 harus mengikuti protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah pusat. Dari para pihak yang di wakikan ini diharapkan membawa beberapa aspirasi dari masyarakat mengenai masalah yang terjadi di lingkungan desa Romaglasa untuk dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya untuk mencapai pembangunan desa yang berkualitas”. (Hasil wawancara dengan AH, 31 Mei 2021).

Sependapat dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Memang tidak semua lapisan masyarakat kembali di libatkan dalam pertemuan atau rapat seperti penyusunan RPJMDes dengan pertimbangan masyarakat memiliki kesibukan masing-masing. Kalau ada bentuk penyampaian aspirasi bisa melalui anggota kami ataupun para perwakilan masyarakat lainnya untuk di sampaikan kembali”.(Hasil wawancara dengan ND, 6 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses perencanaan RPJMDes di Desa Romanglasa tidak semua lapisan atau kalangan masyarakat di undang untuk mengikuti proses RPJMDes hanya beberapa orang terkait seperti para stekholder, BPD, Kepala Dusun, Kepala RT/RW dan para Tokoh masyarakat lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah di atur oleh pemerintah di masa pandemi covid 19 untuk mencegah dari wabah virus.

Tambahan wawancara dengan sekretaris Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Secara administrasi kami sudah berusaha mengundang semua lapisan masyarakat yang terkait untuk mengikuti proses penyusunan RPJMDes untuk menyampaikan aspirasi tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat hadir karena adanya beberapa faktor atau kendala dari kesibukan sehingga mereka tidak sempat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut”. (Hasil wawancara dengan EH, 3 Junii 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat kembali diketahui bahwa tidak semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya di wakilkan pada beberapa pihak terkait sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan pada aspirasi yang di bawah pihak tersebut. dalam proses perumusan masalah seharusnya masyarakat harus mampu ikut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan solusi dari masalah yang mendesak.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu Ketua pemuda sekaligus Ketua LSM yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengambilan keputusan atau proses Musrebang atau pun RPJMDes seharusnya masyarakat harus mampu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karena ini menyangkut perencanaan pembangunan yang berkelanjutan jadi memerlukan perencanaan yang tepat sasaran bukan hanya masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan tapi masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya dari program kebijakan tapi sebaliknya masyarakat harus mengetahui perencanaan tersebut. tetapi kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk berpartisipasi seperti masyarakat yang seharusnya di undang tidak di undang. atau mungkin karena ada unsur politik yang dimainkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara dengan MI, 6 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan program kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya masyarakat dijadikan sebagai subjek dan bukan hanya sebagai obyek dari program kebijakan yang telah di buat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri dan masyarakat pun akan sadar dan paham akan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya.

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu

kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab II Keith Davis (Sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan perumusan masalah terhadap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan cita-cita dalam kelompok yang hendak di capai. Sedangkan, menurut Isbandi Rukminto yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Perencanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan oleh semua masyarakat. Pada dasarnya pembangunan yang partisipatif harus mampu menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang merata secara berkeadilan.

2. Partisipasi Tenaga (*physical participation*)

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut

berpartisipasi di dalamnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa terutama dibidang infrastruktur dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana diberikan oleh masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau program pembangunan berupa tenaga atau dapat di sebut gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangsih berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan desa Romanglasa tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah. Seperti wawancara oleh kepala Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama dalam lingkungan desa Romanglasa ini, karena itu dapat meringankan atau mempercepat kegiatan pelaksanaan pembangunan seperti pembuatan pembangunan jalan dan drainase, masyarakat bisa bergotong royong untuk membersihkan saluran untuk mempercepat pembangunan tersebut namun harus mengikuti aturan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 ini”. (Hasil wawancara AH, 31 Mei 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi memberikan tenaga berupa gotong royong untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat untuk umum atau masyarakat setempat. Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini masih kurang atau tidak maksimal.

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu anggota

BPD yang mengatakan:

“Memang betul saya melihat tidak semua masyarakat turun langsung kelokasi untuk memberikan sumbangsih berupa tenaga atau ikut bergotong royong untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, mungkin karena pekerjaan yang mayoritas masyarakat disini adalah pencetak batu bata sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi”. (Hasil wawancara dengan ZD, 2 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga berupa gotong royong atau pun kerja bakti masih sangat minim atau kurang maksimal karena adanya suatu pekerjaan yang mayoritas masyarakat desanya adalah pencetak batu bata sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Saya pada saat proses pelaksanaan pembangunan tidak bisa ikut terlibat memberikan tenaga atau bergotong royong karena suatu pekerjaan yang kadang bertepatan dengan proses pengerjaan pembangunan jadi saya lebih memilih untuk meneruskan pekerjaan karena saya juga menganggap pasti pemerintah sudah memfasilitasi program tersebut”. (Hasil wawancara dengan AS, 3 Juni 2021).

Tambahan wawancara dengan ketua pemuda yang sekaligus menjabat sebagai ketua LSM Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku pemuda melihat dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa memberikan sumbangsih berupa tenaga atau ikut bergotong royong pada saat pelaksanaan pembangunan masih sangat minim. Mengapa demikian karena disebabkan oleh beberapa hal terutama terkait dengan pekerjaan mayoritas masyarakat setempat, dan kurang adanya komunikasi yang baik antar pemerintah atau para aparat desa dengan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan IH, 5 Juni 2021).

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa jelas partisipasi masyarakat berupa tenaga di desa Romanglasa masih sangat minim karena di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu dari segi pekerjaan, kurangnya komunikasi yang baik dan kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat kurang maksimal. Sehingga partisipasi berupa tenaga dalam proses pembangunan kurang di respon atau bersifat acuh tak acuh terhadap pelaksanaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Keith Davis (sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan sastropetro(1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turun serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mudah di lakukan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi dalam bentuk tenaga. Maka dari itu perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi

diketahui bahwa dalam pelaksanaan perumusan masalah dan pengambilan keputusan tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan seperti rapat Musrembang dan proses RPJMDes, jika masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut maka masyarakat akan lebih berpartisipasi karena masyarakat merasa mengetahui bentuk rencana jenis pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dan berapa banyak anggaran serta jenis anggaran apa yang digunakan seperti ADD, ADDS ataupun APBD dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga masyarakat ikut memikul beban dan tanggung jawab bersama. Agar pembangunan ini dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh masyarakat.

Dalam proses perencanaan terkadang masyarakat atau pihak yang ikut terlibat terjebak dalam proses perencanaan. Perencanaan itu cenderung berdasarkan keinginan bukan dari skala prioritas kebutuhan dari masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan ini hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat saja.

2. Partisipasi Tenaga (*physical participation*)

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam bentuk tenaga sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Namun tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tidak menutup kemungkinan ditemukan hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa

ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) dimana partisipasi masyarakat di desa Romanglasa dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih sangat minim, di tinjau dari banyaknya masyarakat yang tidak hadir untuk ikut berpartisipasi pada saat pelaksanaan kegiatan seperti gotong royong dan kerja bakti, ini di sebabkan karena kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat untuk mengarahkan dalam memberikan kontribusi dalam bentuk fisik sehingga masyarakat akan terfokus kepada kesibukan pekerjaannya masing-masing.

3. Partisipasi keahlian (*participation with skill*)

Peran masyarakat dalam memberikan sumbangan keahlian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan keterampilan. Keterlibatan masyarakat ini tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini perlu di sikapi sebagai dinamika dalam memberikan suatu pekerjaan yang berbeda tingkat ragamnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam partisipasi masyarakat berupa keterampilan belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) dimana kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam memberikan keterampilan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat bersikap apatis terhadap pembangunan walaupun masyarakat desa Romanglasa cukup banyak yang memiliki keterampilan di bidang infrastruktur

seperti tukang bangunan. Sehingga masyarakat menyerahkan kepada pihak pemerintah sepenuhnya untuk menyelesaikan kegiatan pelaksanaan pembangunan.

4. Partisipasi Barang (*Material participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang baik berupa alat-alat bangunan atau pun perkakas dalam menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam wujud barang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro,1998:51) masyarakat antusias ikut serta terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa Romanglasa yaitu meminjamkan alat alat kerja manual namun lebih kepada alat yang kurang berkualitas. Dengan begitu alat yang dipinjamkan tersebut kurang memiliki nilai manfaat untuk dipergunakan oleh pekerja dilapangan.

5. Partisipasi uang (*Money participation*)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa memberikan kontribusi berupa dana atau iuran, kendati bentukannya tidak selalu uang tunai secara langsung namun bisa berupa proses pengajuan-pengajuan yang dilaksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan iuran dana dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51) dimana partisipasi masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada karena rendahnya tingkat pendapatan ekonomi dari masyarakat desa Romanglasa untuk bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk uang, sehingga masyarakat lebih memilih memberikan kontribusi dalam bentuk makanan ringan atau pun hanya sekedar minuman.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa yaitu:

1. Partisipasi Pikiran, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi pikiran dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami dalam proses pengambilan keputusan baik itu bentuk gagasan dari tokoh masyarakat desa dalam proses Musrebang atau pun RPJMDes yaitu:
 - a. Dapat diketahui bahwa masyarakat yang mewakili belum mampu menyampaikan aspirasinya atau seringkali terjebak dalam proses perencanaan bukan berdasarkan tingkat prioritas dari masyarakat itu sendiri sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa.
 - b. Dalam pengidentifikasian masalah atau perumusan masalah dalam proses Musrebang dan RPJMDes masyarakat yang seharusnya di undang tidak di undang karena adanya kebijakan dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyampaikan

aspirasinya.

2. Partisipasi Tenaga, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi tenaga dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu minimnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan bantuan secara fisik berupa gotong royong dan kerja bakti pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat.
3. Partisipasi Keahlian, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi keahlian dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu kurangnya pemahaman sehingga mengakibatkan masyarakat lebih terfokus kepada kesibukan masing-masing.
4. Partisipasi Barang, berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi barang dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu masyarakat memberikan peralatan yang kurang layak atau kurang berkualitas pakai untuk dipinjamkan kepada pekerja disebabkan karena masyarakat tidak memiliki banyak materi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
5. Partisipasi Uang, berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai partisipasi uang dapat diketahui hambatan yang di alami dimana masyarakat tidak secara langsung dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk uang secara tunai namun dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada pekerja disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan yang mayoritas masyarakat desa hanyalah petani dan pembuat batu bata. Masalah anggaran yang seharusnya di informasikan kepada masyarakat

melalui perwakilan masyarakat yang ikut dalam proses Musrembang dan RPJMDes tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui jenis anggaran apa saja yang digunakan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan

Dari beberapa hambatan di atas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa:

1. Partisipasi Pikiran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa mengatasi hambatan dalam memberikan kontribusi berupa pikiran dimana masyarakat memberikan aspirasi yang bersumber dari tokoh masyarakat ataupun yang mewakili dalam pengambilan keputusan harus mampu memprioritaskan skala kebutuhan dari masyarakat desa Romanglasa dari pada keinginan saja, dan pemerintah desa seperti RT atau kepala Dusun sebagai pemerksa yang dekat dengan masyarakat harus mampu membangun komunikasi yang baik antar masyarakat agar aspirasi yang di berikan masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaan musyawarah dapat tersampaikan secara langsung sehingga pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan individu menjadi kepentingan umum.
2. Partisipasi Tenaga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dapat di simpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah desa

melakukan sosialisasi untuk mengajak, mengarahkan serta melakukan komunikasi yang baik akan pentingnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat merasa sadar dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam hal ini swadaya dari masyarakat baik dilakukan dengan cara bergotong royong ataupun individu yang merupakan inisiatif atau kesadaran akan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan.

3. Partisipasi Keahlian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam hambatan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi keahlian yaitu pemerintah desa dapat menunjuk masyarakat setempat sebagai tenaga ahli agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam partisipasi keahlian. Ini merupakan salah satu bentuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dari banyaknya mayoritas sebagai pekerja pencetak batu bata. Pihak yang berkempetingan dapat menunjuk beberapa orang yang terampil dalam bidangnya seperti tukang bangunan atau tukang pertembokan, hal ini agar tidak adanya pemertisiran yang bertumpu pada satu fokus pekerjaan.
4. Partisipasi Barang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi dalam bentuk barang di desa Romanglasa dengan memberikan perintah kepada masyarakat untuk memberikan alat

atau perkakas manual yang bisa dipakai dengan layak yang menunjang pembangunan karena nantinya juga akan bertimbal balik kepada masyarakat. Dengan begitu alat yang diberikan bisa di manfaatkan dengan baik oleh para pekerja dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

5. Partisipasi Uang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan masyarakat dalam partisipasi memberikan kontribusi berupa uang di desa Romanglasa untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa bisa dalam bentuk makanan atau minuman karena dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat maka masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa makanan atau dalam bentuk terprosedur dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini tokoh masyarakat melalui ajuan untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur menginformasikan kepada masyarakat atau tokoh masyarakat bahwa turunnya alokasi dana melalui beberapa proses. Ini merupakan bentuk penjelasan kepada masyarakat bahwa turunnya anggaran atau pencairan dana dilakukan secara bertahap atau terproses sehingga dana tidak langsung cair sekaligus. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal ayat 5 bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dari beberapa hambatan terhadap pembangunan infrastruktur di atas

seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat yaitu:

- a. **Transparansi(keterbukaan)**, pemerintah harus transparansi terhadap program pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat mengetahui informasi terhadap program pembangunan baik itu anggaran pengelolaan pembangunan ataupun anggaran belanja dana desa melalui papan informasi.
- b. **Partisipasi, keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan** merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan dimana masyarakat dijadikan subjek bukan hanya sekedar objek dari kebijakan program pembangunan tersebut.
- c. **Dapat dinikmati**, program pembangunan yang partisipatif merupakan program yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena pembangunan tersebut adalah program yang di tujukan kepada masyarakat sehingga program pembangunan ini dapat dirasakan secara keseluruhan,berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)**, program pembangunan adalah kegiatan antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerja sama dengan masyarakat sehingga program pembangunan infrastruktur ini dapat dipertanggung jawabkan, baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang ikut terlibat.
- e. **Berkelanjutan (sustainable)**, program pembangunan adalah kegiatan yang

berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Dimana program ini masyarakat terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi dari pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur dapat dirasakan dan dijaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Pemerintah harus mampu menerapkan strategi kebijakan atau upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan pedesaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan pokok, sarana dan prasarana, sumber daya dan potensi masyarakat secara berkelanjutan. Serta disebutkan juga dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi pikiran (*Psychological participation*), dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Romanglasa masih sangat minim dalam proses Musrembang dan RPJMDes sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik.
2. Partisipasi tenaga (*Physical participation*), dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Romanglasa masih sangat minim dalam memberikan kontribusi berupa tenaga dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat setempat.
3. Partisipasi keahlian (*Participation with skill*), dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Romanglasa cenderung bersifat apatis karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sehingga masyarakat hanya terfokus pada kesibukan masing-masing.
4. Partisipasi barang (*Material participation*), dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Romanglasa sudah ikut berpartisipasi dengan meminjamkan alat atau perkakas namun kualitasnya kurang baik.
5. Partisipasi uang (*Money participation*), masyarakat di desa Romanglasa belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam bentuk uang secara tunai namun masyarakat bisa memberikan makanan seadanya kepada

pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Romaglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa:

1. Masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun.
2. Perlu adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan pemahaman dan kesadaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan.
4. Perlu adanya bentuk transparansi atau informasi kepada masyarakat mengenai dana anggaran dari pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

Daftar pustaka

- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15*(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara, 5*, 5375–5388. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_\(02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_(02-13-17-04-19-07).pdf)
- Inggrid Kawulur, Marlien T. Lopian, J. E. kaawoa. (2007). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. *Fisipol, 1*–14.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Lach, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15*(2), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kurniyati, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang-Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT, 5*(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Rpjm des) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4*(2), 7.
- Nain, U. (2019). Pembangunan desa. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris, 1*.
- Nurwanda, A. (2016). partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (studi analisis kebijakan pemerintah desa). *Ilmu Pemerintahan, 28*–39.
- Orocomna, L. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

- Pembangunan (Studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara). *Jurnal Governance*.
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199.
- sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261–270.
- Zamhariri. (2008). Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4, 101–110.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, 1987, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL_02-13-17-04-19-07).pdf)
- Inggrid Kawulur, Marlien T. Lapijan, J. E. kaawoa. (2007). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. *Fisipol*, 1–14.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kurniyati, Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara*. Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip

Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RpjmDes) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 7.
- Nain, U. (2019). Pembangunan desa. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, 1.
- Nurwanda, A. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Ilmu Pemerintahan*, 28–39.
- Orocomna, L. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan(Studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara). *Jurnal Governance*.
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D. alfabeta.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261–270.
- Zamhariri. (2008). Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembagunan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4, 101–110.

yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Partisipasi keahlian (*participation with skill*)

Partisipasi masyarakat berupa keahlian atau keterampilan adalah salah satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat melalui keterampilan yang dimiliki terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial.

Berikut wawancara dengan ketua RT yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang infrastruktur di Desa Romanglasa itu cukup banyak tetapi hanya ada beberapa orang yang mau bisa ikut berpartisipasi” (Hasil wawancara dengan IT, 7 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa di Desa Romanglasa sebenarnya memiliki masyarakat yang cukup banyak memiliki keterampilan di bidang pembangunan infrastruktur. Namun masyarakat tidak ikut berpartisipasi memberikan keahliannya pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung. Apabila masyarakat sekitar ikut berpartisipasi secara sukarela maka pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Namun ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Seperti yang dinyatakan oleh ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Romanglasa dalam memberikan keahlian dibidang pembangunan infrastruktur saya rasa sangat minim, karena masyarakat lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaannya. Padahal jika di pikir apabila masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan keahliannya secara sukarela akan memberikan manfaat sangat besar karena pembangunan ini kan untuk masyarakat sendiri otomatis jika

pengerjaannya cepat di lakukan maka akan berdampak baik untuk kesejahteraan umum, misalnya pembangunan drainase dan jalan". (Hasil wawancara dengan ND, 6 Juni 2021).

Dari wawancara diatas yang dilakukan peneliti dapat di ketahui bahwa minimnya partisipasi masyarakat di desa Romanglasa disebabkan oleh faktor pekerjaan dari mayoritas masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak cukup efektif untuk dikerjakan secara cepat walaupun pemerintah sudah memberikan tenaga ahli dibidangnya dan di berikan upah untuk mengerjakan pembangunan tersebut.

Pendapat yang berbeda dengan masyarakat yang di wawancarai oleh penulis yang mengatakan bahwa:

"Saya sebenarnya cukup memiliki keahlian sebagai pekerja bangunan namun saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena memiliki pekerjaan untuk mencetak batu bata seperti yang dilakukan mayoritas masyarakat disini, kadang kalau ada waktu senggang saya bisa ikut membantu. Tetapi kan sudah banyak pekerja yang di arahkan oleh pemerintah untuk mengerjakannya jadi lebih baik kami serahkan kepada pihak pemerintah saja." (Hasil wawancara AS, 1 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat terkendala dari segi pekerjaan yang dilakukannya sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur, walaupun begitu seharusnya pemerintah dan masyarakat setempat harus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab II Keith Davis (sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah

keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain masyarakat yang sadar akan pentingnya tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur akan mudah untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang hendak di inginkan oleh suatu bangsa.

Pembangunan adalah suatu perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan suatu kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang di inginkan. Menurut teori dari Siagian (1994:9) yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan teori dari Siagian ini masyarakat harus paham akan perannya sebagai masyarakat dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dan pemerintah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

4. Partisipasi Barang (*Material participation*)

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa: bagian kesatu pendapatan pasal 9 angka 6 swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana di maksud pada ayat 3 huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang.

Partisipasi masyarakat desa Romanglasa dalam menyumbangkan swadaya atau tenaga untuk pembangunan fisik baik perbaikan jalan, pembuatan drainase dan talud. Kompensasi ini merupakan kesepakatan pemerintah desa Romanglasa dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik. Kategori yang termasuk dalam partisipasi barang yakni sarana dan prasarana yang berbentuk peralatan. Masyarakat dalam hal ini memberikan alat dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik di desa Romanglasa agar berjalan lancar.

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Kami melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal bisa memberikan kontribusi berupa perkakas atau peralatan yang dibutuhkan pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik guna memperlancar proses pengerjaan pembangunan, walaupun pemerintah telah menyediakan atau memfasilitasi proses pelaksanaan pembangunan tetapi jika ada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi justru itu lebih bagus.” (Hasil wawancara dengan AH, 1 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan kontribusi berupa alat dan perkakas untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan walaupun pemerintah telah memfasilitasi proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Senada dengan hasil wawancara kepada salah anggota BPD yang mengatakan bahwa:

“masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan alat atau perkakas

yang bisa digunakan atau layak pake dalam rangka mempercepat pembangunan, karena pada saat pengerjaan pembangunan infrastruktur kadang tukang bangunan tidak sempat membawa peralatan atau lupa dalam membawa alatnya. Maka dari itu bisa jadi masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur meminjamkan perkakas yang dapat digunakan tersebut". (Hasil wawancara dengan ZD, 6 juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat agar kiranya jika ingin ikut berpartisipasi dalam bentuk barang bisa meminjamkan alat atau perkakas yang bisa layak pake untuk keberlangsungan pembangunan infrastruktur itu sendiri dan untuk mempercepat proses pembangunan tersebut.

Seperti hasil wawancara yang di lakukan kepada salah satu masyarakat desa Romanglase yang mengatakan bahwa:

"Pada saat pelaksanaan pembangunan kami kadang memberikan atau meminjamkan alat atau perkakas yang dibutuhkan para pekerja untuk menunjang kelancaran proses pembangunan tersebut gerobak, selang air atau alat lainnya." (Hasil wawancara dengan NY, 5 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat sangat antusias ikut berpartisipasi untuk meminjamkan alat dan perkakas yang dibutuhkan untuk kelancaran pengerjaan pembangunan tersebut. dalam hal ini masyarakat bisa memberikan kontribusi berupa barang yang dipinjamkan kepada para pekerja untuk menunjang pekerjaan pembangunan.

Seperti juga yang dikatakan oleh ketua LSM yang mengatakan bahwa:

"seharusnya pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama dengan baik untuk masalah pembangunan terutama dalam proses pembangunan infrastruktur itu sendiri sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ini masyarakat bisa langsung memberikan kontribusinya berupa memberikan alat atau perkakas yang layak pake. Karena masyarakat kan sering kali berpikir untuk apa meminjamkan alat atau perkakas kita toh sudah ada alat yang

diberikan oleh pemerintah seharusnya para pekerja tersebut tidak perlu lagi mengandalkan pemberian masyarakat". (Hasil wawancara dengan MI, 7 juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat harus paham akan pentingnya partisipasi dalam bentuk barang sehingga masyarakat dengan sukarela dapat meminjamkan alat atau perkakas yang layak pake dalam proses pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mempercepat pengerjaannya. Pemerintah selaku penyedia fasilitas dalam proses pembangunan bisa saja membutuhkan kontribusi berupa alat yang ada di lingkungan masyarakat desa Romanglasa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang panjang, harus ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk proses pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan arahan atau kebijakan dari pemerintah. Seperti teori yang ada dari bab II Keith Davis (sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain pelaksanaan pembangunan harus mampu terkordinasi dengan baik atau dengan perencanaan program dari kebijakan pemerintah ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut terlibat dengan sukarela tanpa ada paksaan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

5. Partisipasi Dana (*Maney participation*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi berupa uang dimana masyarakat menyumbangkan uang sebagai bentuk materi, walaupun prosesnya bisa secara tidak langsung namun aplikasinya dapat mewujudkan satu hasil berupa pembangunan fisik. Peran masyarakat dalam memberikan dana atau iuran, kendati bentuknya tidak harus selalu uang atau bahkan sebuah proses pengajuan-pengajuan yang di laksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan dana.

Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“ kami tidak membatasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk dana berupa uang atau pun sebagainya tetapi dilihat dari pendapatan masyarakat di desa Romanglasa ini yang mayoritas sebagai pembuat batu bata jadi mungkin banyak dari masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi memberikan uang tapi bisa dalam bentuk lain.” (Hasil wawancara dengan EH, 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk uang karena di lihat dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakatnya yaitu dari pembuat batu bata. Tetapi masyarakat yang memiliki sisi materi yang berkucukupan bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan uang secara langsung untuk menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.

Senada dengan pendapat dari ketua BPD desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Memang betul dari segi pemerintah tidak memungut uang dari masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pun program pembangunan lainnya, Jika pun ada dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk uang kami sangat senang. Tetapi masyarakat disini terkadang membuatkan makanan ringan ataupun sekedar minuman. Walaupun masyarakat tidak secara langsung memberikan uang tapi bisa dalam bentuk seperti itu.” (Hasil wawancara dengan ND, 5 Juni 2021).

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak secara langsung memberikan uang tetapi dengan cara membuatkan makanan untuk para pekerja. Itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam hal memberikan kontribusi walaupun tidak secara langsung.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Saya memang tidak bisa berpartisipasi memberikan kontribusi berupa uang pada program pembangunan infrastruktur karena faktor ekonomi, kami hanya bisa memberikan sedikit makanan ringan atau pun minuman untuk para buruh yang sedang bekerja tersebut.” (Hasil wawancara dengan NY, 6 Juni 2021).

Senada dengan pendapat dari Ketua pemuda sekaligus LSM desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Memang betul masyarakat disini kurang bisa berpartisipasi dalam memberikan kontribusi berupa uang pada kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena di pengaruhi oleh pendapatan warga yang masih rendah apalagi ini adalah masa-masa yang sulit karena dampak dari pandemi covid 19 yang secara perlahan mengikis perekonomian sehingga mereka tidak bisa ikut berkontribusi memberikan uang secara langsung.” (Hasil wawancara dengan MI, 6 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak secara langsung memberikan kontribusi berupa uang karena faktor pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat di desa Romanglasa masih sangat rendah.

Sebagaimana teori dari bab II Keith Davis (Sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam bentuk uang tidak harus secara langsung tapi bisa dengan membuatkan makanan seadanya sebagai bentuk keterlibatannya dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan teori dari Todaro (2000:18) yang mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Beranjak dari teori tersebut bahwasanya masyarakat bisa ikut terlibat atau berpartisipasi dalam memberikan kontribusi berupa materi atau uang jika pendapatan masyarakat bisa tercukupi.

Dari bentuk partisipasi di atas dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa tidak lepas dari banyaknya kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

“Ada berbagai bentuk hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa ini yaitu :1). Adanya kebijakan dari pemerintah desa yang tidak melibatkan atau membatasi lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam proses

perencanaan atau pengambilan keputusan hanya di wakikan kepada para aparat atau para stekholder. Masyarakat menjadi objek dari program pembangunan infrastruktur bukan sebagai subjek. 2) Masyarakat yang ikut dalam perencanaan seringkali terjebak dari proses perencanaan, dimana masyarakat merencanakan keinginan bukan berdasarkan tingkat kebutuhan. 3). Terkadang masyarakat yang di undang untuk terlibat tidak hadir dalam proses perencanaan, dan masyarakat yang seharusnya hadir tidak di undang oleh pihak pemerintah desa.,Karena adanya faktor kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri. 4).Kebijakan dari pemerintah pusat yang memiliki aturan yang mengikat sehingga tidak adanya kewenangan dari desa untuk melaksanakan program pembangunan tersebut. 5). Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap program pembangunan. 6). Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat mengakibatkan masyarakat harus bergantung dari pekerjaannya sehingga ini menjadi salah satu kendala dari masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur. 7). Kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, komunikasi adalah hal terpenting untuk keberhasilan dari kegiatan pembangunan,dengan adanya feedback dari masyarakat maka masyarakat akan mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan”. (Hasil wawancara dengan EH, 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa terdapat banyak kendala atau hambatan baik dari masyarakat itu sendiri ataupun kebijakan program dari pemerintah desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat minim dilihat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat atau terkesan bersifat apatis terhadap pembangunan karena adanya batasan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat setempat untuk memberikan aspirasi secara langsung. Strategi pemerintah yang tidak optimal dalam menerapkan kebijakan terhadap pembangunan belum mampu menuah perubahan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan peneliti di atas dapat di

ambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa masih sangat minim karena sifat masyarakat yang cenderung apatis terhadap proses pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah dan masyarakat tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat membuat masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung dan merasa nggan untuk ikut terlibat membuat keputusan dalam proses perencanaan.

Pembangunan infrastruktur berasal dari proses perencanaan yang baik sehingga menghasilkan pembangunan yang baik pula. jika masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari awal dari proses penentuan arah maka masyarakat akan terlibat untuk ikut memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur ini dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

C. Pembahasan Penelitian

Keberhasilan suatu pembangunan yang bersifat partisipatif tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Namun tidak terlepas juga dari berbagai hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan partisipatif ini tidak hanya usaha dari pemerintah semata ataupun masyarakat itu sendiri, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan bersama antar pemerintah dengan masyarakat yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk desa maupun seluruh lapisan

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan yang ada di desa Romanglasa merupakan cerminan keberhasilan dari pembangunan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu proses pembangunan yang ada dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Oleh karena itu kesadaran dari masyarakat merupakan suatu keberhasilan dari pembangunan tersebut, karena adanya pencapaian target program pembangunan yang perlu ditunjukkan pada kebijakan pemerintah. Sehingga sehubungan dengan ini hasil penelitian dapat dikaitkan bahwa pembangunan partisipatif juga dapat ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

1. Partisipasi pikiran (*psychological participation*)

Partisipasi pikiran sebagai bentuk keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dalam merumuskan masalah atau dalam proses perencanaan baik secara emosional maupun mental terdapat hambatan dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropetro.1998:51)